

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DALAM ISU PARADIPLOMASAI BIDANG
EKONOMI DAN PENDIDIKAN**

TAHUN 2010 – 2019

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Artian Widya Husna

17323118

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**Kebijakan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Isu
Paradiplomasi Bidang Ekonomi Dan Pendidikan Tahun 2010 – 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat S1 Hubungan
Internasional



Disusun Oleh:

Artian Widya Husna

17323118

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DALAM ISU PARADIPLOMASI BIDANG EKONOMI DAN
PENDIDIKAN TAHUN 2010-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

27 September 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A.

3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 september 2021,



Artian Widya Husna

HALAMAN PERSEMBAHAN

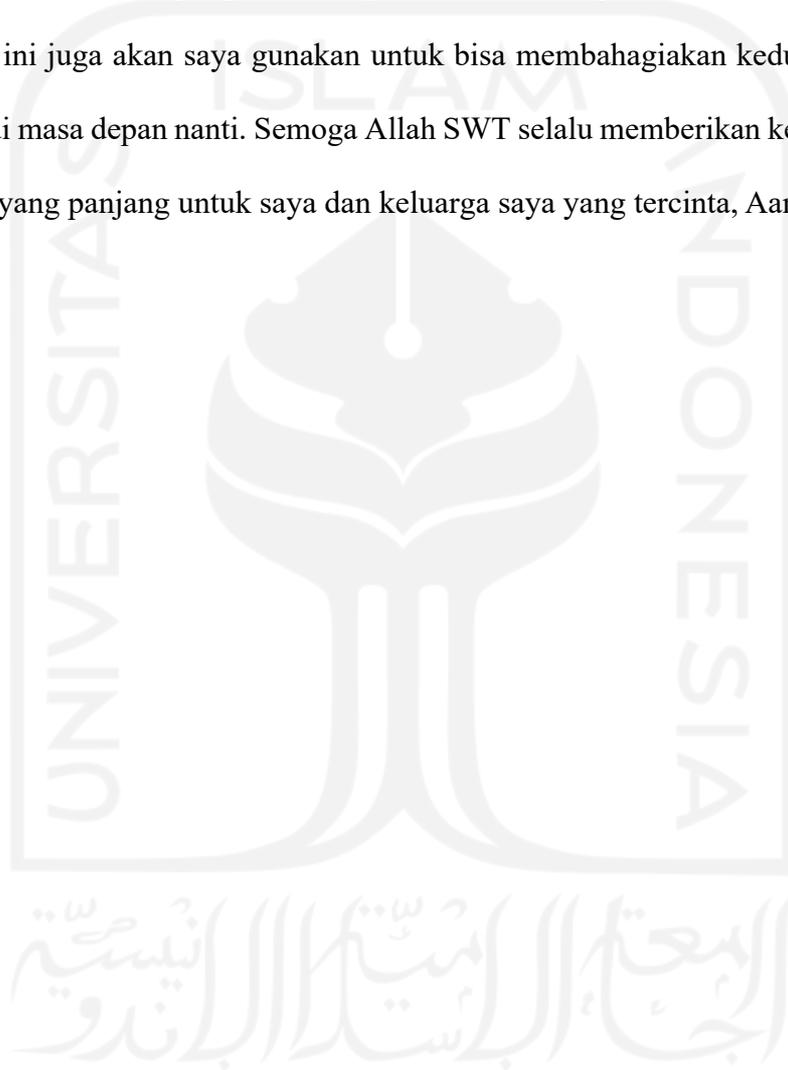


Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan juga rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga selesai. Kedua, shawalat serta salah selalu panjatkan kepada Nabi Muhamad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sudah membantu mendo'akan dan tak lupa untuk memberikan semangat kepada saya, yaitu:

Terutama kepada orang tuaku, Ayah Amiruddin S, H, M,Kn dan Mama Raziah Sulaiman yang saya cintai, terima kasih selalu menjadi *support system* untuk anaknya, baik secara moral maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Untuk Mama, terima kasih untuk do'a mu yang selalu tulus mendoakan anak-anakmu. Terima kasih selalu menyayangi saya dan selalu mengingatkan saya untuk tetap menjalankan ibadah agar semua urusan dipermudah oleh Allah SWT. Untuk Ayah, terima kasih sudah selalu mengajarkan saya untuk berperilaku baik kepada sesama dan selalu bersyukur atas apapun. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik dan tegas dan selalu menyayangi keluarga.

Semoga dengan gelar sarjana S1 yang saya dapatkan saat ini dapat menjadikan saya sebagai orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Gelar sarjana ini tentunya menjadi awal mula saya untuk menginjakkan kaki di kehidupan yang sebenarnya dan tidak menjadi beban orang tua lagi. Gelar ini juga akan saya gunakan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya di masa depan nanti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk saya dan keluarga saya yang tercinta, Aamiin.



HALAMAN MOTTO



“Sekuat apapun kau berusaha, Sebaik apapun kau merencanakan, jika Allah belum mengizinkan, maka kau harus bersahabat dengan Sabarmu.”

“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah - 286)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan ttanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa Do'a.”

(Ridwan Kamil)

“Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.”

(Lenang Menggala)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku rektor dari Kampus Tercinta, Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta arahan
3. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya
4. Bapak Hadza Min Fadly Robbi selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Terima kasih sudah memberikan bimbingan, saran serta arahan selama penulisan skripsi. Terima kasih sudah sabar menghadapi penulis. Mohon maaf apabila selama penulis menjadi mahasiswa sering melakukan kesalahan, semoga pak hadza selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

5. Miss Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A selaku Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan semangat serta nasehat untuk penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih sudah sabar menghadapi saya. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa sering merepotkan Pak Enggar. Semoga Bapak sehat terus dan diberikan kelancaran dalam urusannya.
6. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu akan tetapi hal mengenai kehidupan berhasil penulis dapatkan dari Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
7. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu penulis dalam urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah bisa diajak diskusi dan mendengar keluh kesah penulis selama menulis skripsi.
8. Terimakasih kepada Arry Novita Husna S,H,M,Kn sebagai kaka kandung penulis, Ardimas wisnu Triasna sebagai adik kandung penulis dan Articha Swarai Prestis Husna sebagai adik kandung penulis. Terima kasih selalu memberikan support agar tidak merasa tertekan.

Terima kasih sudah mengerti dan memahami diri penulis. Semoga selalu menjadi keluarga yang harmonis.

9. M. Rizky Akbar yang telah memberi semangat dan dukungan tiada henti dan sekaligus menjadi pendengar penulis dan bersedia membantu disaat penulis membutuhkan bantuan. Terima kasih sudah selalu mengingatkan penulis ketika penulis sedang malas untuk mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi orang pertama yang siap mendengarkan cerita penulis. Terima kasih sudah membantu banyak sekali ketika di Yogyakarta. Semoga Akbar bisa segera melanjutkan S2 dan mendapatkan Pekerjaan dan semoga diberikan kesehatan serta dipermudah segala urusannya. Terima kasih untuk tahun-tahun terbaiknya.
10. Teman-teman *Texas*, Relita Fani, Exsa Pallawa, Sania Nailly, Gita Ayu, Shenadia Melva, Dhea Nandhini. Terima kasih sudah mendengarkan keluh dan kesah penulis selama kuliah di Yogyakarta. Terima kasih sudah selalu ada ketika penulis butuh bantuan. Terima kasih sudah menjadi Teman Terbaik penulis selama kuliah di Universitas Islam Indonesia . Terima kasih untuk semangatnya ketika penulis mengalami kesedihan. Semoga kalian diberikan kesehatan dan sukses oleh Allah SWT. Penulis minta maaf apabila ada salah-salah kata saat bercanda atau bertemu dengan teman-teman. Terima kasih sudah menjadi manusia yang baik. Terima kasih sudah membantu penulis dalam perkuliahan. Beberapa orang yang penulis kenal pertama kali ketika menginjakkan kaki di Universitas Islam Indonesia.

Terima kasih sudah menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Kalian diberikan kesehatan serta dapat sukses di waktu keberuntungannya masing-masing.

11. Teman-teman *Rempong*, yaitu teman-teman yang berasal dari Aceh: Cut Asti, Syarafina Ghazali, Safira Hanini, Mikhialul Mauna, Suci Ramadhani, Terima kasih selama di Aceh kita terus bersaing untuk menyelesaikan Skripsi kita. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih sudah selalu *support* ketika penulis mengeluh. Semoga kalian diberi kesehatan dan dipermudah urusannya. Sampai ketemu lagi nanti semoga kita dipertemukan Kembali dengan keadaan kalian semua sudah sukses.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu penulis Ketika penulis membutuhkan bantuan dan informasi terkait perkuliahan, Terima kasih sudah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kea rah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah disebutkan, dimana telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Yogyakarta, 21 September 2021

Penulis

Artian Widya Husna



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5 Landasan Konseptual.....	16
1.6 Metode Penelitian	19
BAB II DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PARADIPLOMASI.....	23
2.1 TSUNAMI ACEH 2004 DAN PENGEMBANGAN AWAL KEBIJAKAN PARADIPLOMASI DI NAD	23
2.2 LANDASAN YURIDIS PARADIPLOMASI PEMPROV NAD DALAM PARADIPLOMASI.....	27
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NAD DALAM PARADIPLOMASI	32
3.1 KERJASAMA YANG BERJALAN ANTARA PEMROV NAD DAN PEMERINTAH KOTA MITRA (SISTER CITY).....	32
3.2 KERJASAMA NAD DAN PEMERINTAH KOTA MITRA DALAM BIDANG PENDIDIKAN	36
3.3 KERJASAMA NAD DAN PEMERINTAH KOTA MITRA DALAM BIDANG EKONOMI.....	41
3.4 ANALISIS KERJASAMA SISTER CITY.....	46
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran dan Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Universitas-universitas Turki dan Mitra Kerjasama Unsyiah.....38



DAFTAR SINGKATAN

MoU	: Memorandum of Understanding
MDF	: Multi Donor Fund
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU	: Undang Undang
MNC	: Multinasional Corporations
CoMU	: Community Based Mutual Reconstruction Acceleration
JICA	: Japan International Cooperation Agency
IMT - GT	: Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle
SDM	: Sumber Daya Manusia
UNSYIAH	: Universitas Syiah Kuala
UII	: Universitas Ubudiyah Indonesia
BPKS	: Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
IMEU	: Indonesia - Middle East Update
BAINPROM	: Badan Investasi dan Promosi
TAT	: Tourist Authority of Thailand

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu hubungan internasional saat ini terus berubah dari yang bersifat *high politic* seperti konflik dan perang yang cenderung mengedepankan *hard power* ke isu - isukerjasama (rudi,2003). Untuk melakukan hubungan kerjasama yang baik antar negara maka negara memerlukan cara sebagai proses untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Salah satu faktor pendukung yang efektif merupakan komunikasi, karena dalam hubungan kerjasama sering dikatakan dengan diplomasi. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan hubungan internasional yang semakin dinamis maka perkembangan diplomasi pun semakin maju yang dikenal dengan diplomasi modern. Adanya globalisasi menjadikan format diplomasi tingkat tinggi berubah menjadi *the foreign policy and non-central government* yang mengacu pada diplomasi bukan bertumpu *micro diplomacy*. Aktor yang berperan di sub-sistem negara yakni Pemerintah daerah dikenal dengan istilah 'paradiplomasi' (Mukti, 2013).

Paradiplomasi merupakan kajian yang relatif baru dalam ilmu hubungan internasional, paradiplomasi juga mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh Pemerintah regional atau Pemerintah daerah. Dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah "paradiplomacy" pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, panayotis Soldatos tahun 1980an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang

mengacu pada makna *the foreign policy of non-central government*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer, istilah yang dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, Tahun 1990) untuk konsep ini adalah *'micro diplomacy'* (Stefan, 2009: 1-2).

Kerjasama luar negeri oleh daerah otonom dilihat dari sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis, merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat *state-centric* dimana aktor-aktor non-Pemerintah dapat secara leluasa mengambil keputusan hubungan tanpa melibatkan Pemerintah pusat. Terkait bangkitnya semangat partisipasi Pemerintah daerah otonom untuk berkiprah secara internasional, Stefan Wolff mengatakan hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan pemikiran yang paling mendasar tentang kedaulatan negara secara fundamental.

Perkembangan substansial kajian dan telaah konsep paradiplomasi masih sangat minim terutama karena kebijakan luar negeri merupakan ranah kekuasaan pusat. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam arena Internasional adalah suatu keniscayaan. Adapun tujuan Pemerintahan daerah melakukan paradiplomasi adalah untuk menarik investasi, melakukan hubungan dengan perusahaan multinasional di wilayahnya dan mewujudkan peningkatan ekspor. Secara umum kerjasama luar negeri antar kota di Indonesia terbentuk karena adanya persamaan-persamaan di kedua provinsi/ wilayah negara yang berlainan, seperti misalnya ada persamaan kedudukan dan status administrasi, adanya kesamaan ukuran atau luas wilayah dan fungsi, adanya kesamaan karakteristik atau adanya persamaan masalah yang dihadapi. Adanya komplementaritas antara kedua pihak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dapat mengakibatkan terjadinya pertukaran kunjungan pejabat,

pengusaha dan misi-misi lainnya diantara kedua negara tersebut.

Aceh merupakan salah satu daerah yang sisi geografis nya dekat dengan selat malaka yang dahulu provinsi Aceh menempati posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan budaya yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad - abad yang lalu. Aceh sering di sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab. Sehingga menjadikan Aceh sebagai daerah pertama masuknya budayaa dan agama di Nusantara. Pada awalnya Aceh adalah daerah kerajaan yakni Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibu kotanya di Kutaraja atau Banda aceh, secara bertahap memperluas wilayah nya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke semenanjung Malaka. Secara teritorial, Aceh merupakan provinsi paling barat dari pulau Sumatra di Indonesia yang pernah mengalami konflik berkepanjangan. Aceh sudah mengalami beberapa kali perubahn status dalam hubungannya dengan NKRI.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi Daerah Otonom Tingkat I dan pada 27 Januari 1957 A. Hasmy dilantik sebagai Gubernur provinsi Aceh. Namun Gejolak politik di aceh belum sepenuhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama “missi Hardi” tahun 1959, diadakan pembahasan terkait gejolak politik, pemerintahn dan pembangunann di Aceh. Hasil misi tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959, Daerah Otonom Tingkat I atau Provinsii Aceh diubah statusnya menjadi “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap “provinsi Daerah Istimewa Aceh”

dengan perubahan status tersebut, Aceh mempunyai hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Gejolak politik Aceh berlanjut dengan deklarasi *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM) oleh Hasan Tiro. Pada tahun 1976, pemerintah pusat menanggapi hal ini dengan memberikan otonomi khusus dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2002.

Aceh pernah mengalami bencana alam Tsunami yang hebat pada Desember 2004 yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia lebih dari 200.000 orang di berbagai negara. Indonesia merupakan negara yang menerima dampak Tsunami terbesar pada tahun 2004. Dampak tsunami 2004 terparah dilaporkan terjadi di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Tsunami 2004 ini melewati beberapa wilayah lain yang berada di sebelah timur Aceh seperti Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe. Kawasan pantai timur Aceh tersebut menerima dampak tsunami yang lebih kecil dibandingkan dengan kawasan di Banda Aceh dan Pantai Barat-Selatan Aceh. Tsunami Aceh pada tahun 2004 juga menyebabkan 16 negara ber dampak dari gelombang besar tersebut. Selain korban jiwa, Tsunami Aceh juga memberikan kerugian di beberapa sektor lain (Syamsidik, Nugroho, Oktari, dan Fahmi, 2019).

Sebelum Tsunami, diplomasi yang dilakukan oleh Provinsi Aceh sangat sedikit dengan pihak manapun, termasuk dalam negeri. Namun hal ini berubah pasca tsunami di Aceh. Daya tarik Aceh meningkat dan hubungan luar negerinya meningkat. Pasca tsunami yang melanda Aceh, negara asing dengan mudah masuk ke Aceh karena alasan kemanusiaan. UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional dan menentukan bidang apa yang akan dijalankan. Peraturan pemerintah No. 25

Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman tata cara Kerja Sama dengan lembaga atau instansi di luar negeri .

Dalam rangka melaksanakan hubungan diplomatik dengan daerah di luar negeri dapat dilakukan dengan kerja sama kota kembar atau yang disebut *sister city*. Kerja sama ini dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mempererat hubungan antar berbagai bangsa di dunia. Setelah terjadinya bencana Alam Tsunami pada 26 desember 2004, Aceh kemudian memiliki kekuatan baru dalam berdiplomasi Ketika melakukan Kerjasama dengan luar negeri. Diantaranya yaitu hubungan Kerja sama dengan jepang dan swiss dalam proses pembangunan setelah adanya kerusakan besar akibat Tsunami 2004. Secara langsung bencana Tsunami mempengaruhi *soft power diplomacy* bagi pemerintah Aceh dalam menjalin hubungan dan mencapai kesepakatan dengan daerah lain (Novialdi, 2016). Untuk mendukung rekonstruksi Aceh, pemerintah Aceh menerima bantuan dari Multi Donor Fund (MDF) dalam bentuk hibah sebesar \$655 juta. Berkat kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah Aceh pada perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan proyek, banyak konstruksi yang berhasil seperti rumah, jalan, pelabuhan, instalasi pengolahan air, dan ribuan aset infrastruktur pedesaan. Program MDF berlangsung selama hampir 8 tahun terhitung dari 2005-2012. selama periode ini terjadi banyak perubahan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini dipengaruhi oleh keseluruhan upaya rekonstruksi pasca-Tsunami. Para donor di MDF terdiri dari beberapa negara maju serta juga organisasi di tingkat internasional.

Tsunami di Aceh memang telah menciptakan sebuah ruang kesadaran sosial, dan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan provinsi Aceh. Bencana ini mampu menarik banyak simpati dari pihak lokal dan internasional. Pada tahun 2005 kesepakatan MoU Helsinki diterbitkan, kemudian tingkat keamanan di Aceh berangsur membaik sehingga menarik pihak lokal dan asing untuk bekerjasama dan berinvestasi di Aceh. Dalam hal Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri. Dalam praktiknya pemerintahan di daerah telah menjadi kebutuhan karena arus globalisasi yang telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintah yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan akan tertinggal jika tidak membaur dengan dunia internasional. Dalam kewenangan yang cukup luas dari pemerintah pusat maka provinsi Aceh harus memiliki modal yang besar dalam menjalin hubungan luar negeri.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kebijakan dan Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh dalam Isu paradiplomasi di tingkat lokal maupun internasional sejak terjadinya Bencana Tsunami dimana banyak negara- negara yang tertarik membantu mendonorkan dana bantuan kepada Aceh. Dengan alasan tersebut maka penulis mengambil judul untuk penelitian ini: Kebijakan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Isu Paradiplomasi Bidang Ekonomi Dan Pendidikan Tahun 2010 – 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji lebih

dalam bagaimana kebijakan Pemerintah provinsi Aceh Darussalam melakukan Kerjasama dengan mitra Pemerintah kota lain “*sister city*” seperti yang kita ketahui bahwa tujuan Pemerintahan daerah melakukan Paradiplomasi adalah untuk pencarian investasi, pembentukan proyek Bersama, dan berbagai bentuk pengiriman delegasi, melakukan hubungan dengan perusahaan multinasional di wilayahnya dan mewujudkan peningkatan ekspor antar aktor sub-nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam Mengembangkan kebijakan Dalam Isu Paradiplomasi Bidang Ekonomi Dan Pendidikan Pada Tahun 2010-2019?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Dalam Isu Paradiplomasi.
2. Untuk Mengetahui Mitra Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh dan Pemerintah Kota lain *Sister City*.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dianggap penting untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut. mengingat hal ini Aceh merupakan daerah otonomi khusus dengan UU No.11 tahun 2006 Pemerintah Aceh telah mendapatkan kewenangan yang khusus untuk menjalin hubungan Kerjasama dengan Lembaga atau badan luar negeri baik dalam kegiatan seni, budaya dan olahraga internasional. Kewenangan tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan mandiri tanpa harus ada persetujuan dari Pemerintah pusat kecuali masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya kewenangan ini Pemerintah Aceh dapat melakukan Kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan kerjasama paradiplomasi di wilayah Aceh.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melihat data Provinsi Aceh yang melakukan kerjasama internasional dengan beberapa mitra Pemerintah kota (*Sister City*) dan mengkaji hubungan luar negeri daerah yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Aceh untuk melakukan Kerjasama internasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Aceh. Dan bagaimana konsep paradiplomasi atau *sister city* yang sudah dilakukan di berbagai negara dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menarik investor - investor dengan sumber daya alam yang indah yang ada. dan meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan Sumber daya Manusia di Provinsi Aceh. Selain itu, tulisan ini akan menyoroti bahwa paradiplomasi yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Paradiplomasi telah terjadi secara global seperti negara Indonesia dimana wilayah sudah banyak melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara telah terjalin pada beberapa tahun silam seperti provinsi D.I Yogyakarta dengan Kyoto, pada tulisan yang di tulis oleh Habib Alfarisi dalam jurnalnya mengatakan bahwa kerjasama Kerjasama antara DIY dan Kyoto merupakan kerjasama Sister Province yang sangat cukup intensif dan kolaboratif sehingga menguntungkan. Kerjasama ini memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang meliputi kegiatan yang dapat memperkuat kesepahaman mutual. Kerjasama ini di bidang pendidikan diisi dengan pertukaran pelajar dan berbagai lomba yang memungkinkan terjadi sharing culture.. Kerjasama ini banyak mendapatkan banyak hal yang tak ternilai dari adanya Kerjasama yang sudah berlangsung hampir 4 dekade ini. Pada tahun 2015 kerjasama antara DIY dan Kyoto genap 30 tahun, momentum tepat 3 dekade hubungan Kerjasama antara DIY dan Kyoto digunakan untuk penegasan Kembali hubungan persahabatan antara kedua daerah. Delegasia Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubono X mengadakan kunjungan kerja ke Kyoto pada 24-30 Agustus 2015.

Dalam rangka penguatan hubungan Kerjasama antara DIY dengan jepang. Delegasi DIY dan pihak Kyoto menghasilkan sebuah Minute Of discussion yang merupakan dokumen mengenai penguatan Kerjasama yang disepakati dalam bidang pendidikan, pariwisata dan juga kebudayaan. Selain itu diadakan juga acara JJW 2015 atau Jogja-Japan Week yang berlangsung pada 2015. JJW ini diisi dengan berbagai acara pertukaran bedaya, baik budaya Indonesia dan juga jepang seperti adanya kursus membatik, budaya jepang dan lain sebagainya. Selain itu investasi tumbuh dengan subur pada 2015 dengan adanya pertemuan rutin yang diadakan

setiap tahun oleh DIY dan Kyoto, hal ini dapat menjembatani hubungan bisnis antara kedua belah pihak dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bisnis antara kedua belah pihak (Alfarisi, 2021).

Pada Tulisan yang di tulis oleh LAode Muhamad Fathun dalam artikel nya mengatakan bahwa peran pemerintah kota makassar sebagai aktor paradiplomasi adalah menciptakan sebuah kota yang berbasis internet. Kota yang disebut smart city ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan yang cepat dan tepat serta mudah untuk dijangkau. Program strategis seperti smart city harus menjadi program utama bagi sejumlah daerah di Indonesia sebab era digital menuntut tata Kelola pemerintahan yang berbasis pada e-government dan e-diplomacy sebagai usaha menciptakan pelayanan publik yang transparan, berintegritas, dan akuntabel untuk kemaslahatan Bersama dan meminimalkan terjadinya korupsi dan fenomena “raja-raja kecil” di daerah. Praktik smart city di Makassar yang melibatkan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan usaha pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan kota yang lebih modern. Adanya ketersediaan wifi gratis, CCTV, e-KTP, e-restoran, e-karcis dan lain-lain merupakan Langkah strategis menciptakan *Smart City*. Peluang ini sangat potensial bagi kota makassar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sister city bisa dilakukan dengan syarat adanya kesamaan visi, misi, kota pariwisata dan kesamaan-kesamaan lainnya. Peluang ini sangat terbuka lebar bagi kota-kota yang ingin meningkatkan program smart city menjadi *sister city*. Strategi yang bisa dicapai adalah mencari kota di beberapa negara yang berbasis IT untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan tentang manfaat tata kelola kota berbasis IT. Untuk memudahkan dan memperlancar smart city tersebut

maka pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan kota di negara lain yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. Jepang merupakan salah satu negara yang bisa menjadi tujuan utama sister city Makassar misalnya dengan Tokyo atau Kyoto. Jepang sebagai negara dengan kapasitas teknologi informasi yang sangat maju bisa membagi pengetahuan dan pengalamannya kepada Makassar untuk memajukan ekonomi daerah dengan basis teknologi informasi. Peluang ini masih didukung oleh mahasiswa Jepang yang melakukan studi banding ke Makassar. Program pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti pada smart city saja tetapi meningkatkannya menjadi kota kembar. Negara lain yang juga diduga adalah Amerika Serikat. Alasan utamanya adalah Konsula Amerika Serikat sudah mengetahui tata ruang kota Makassar sehingga membuka peluang untuk ditindaklanjuti. Tulisan ini menyatakan bahwa program sister city sebaiknya ditindaklanjuti untuk menciptakan Makassar sebagai kota megapolitan. Sister city bisa menciptakan 'aliansi', bukan aliansi antar negara melainkan antar kota, yang bertujuan mendorong arus transformasi, akomodasi, dan komunikasi untuk mendukung ekonomi daerah yang potensial (Fathun, 2016).

Pada tulisan yang ditulis oleh Berisiko Novialdi dan Saddam Rasanjani dalam artikelnya mengatakan bahwa konsep paradiplomasi adalah hal yang relatif baru fenomena dan subjek dalam penelitian hubungan internasional. Melalui konsep paradiplomasi Pemerintah Aceh menciptakan peluang dengan potensi daerah yang mereka miliki. Salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan provinsi Aceh berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada provinsi Aceh untuk mengembangkan wilayahnya, termasuk membangun hubungan internasional

dengan daerah- daerah lain di luar negeri melalui praktik Paradiplomasi. Di era globalisasi Pemerintah daerah memanfaatkan segala bentuk peluang untuk mengembangkan wilayahnya. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pusat Pemerintah.

Melalui praktik paradiplomasi Pemerintah Aceh mampu membangun kerjasama dengan Pemerintah provinsi luar negeri sesuai dengan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk menjalankan praktik paradiplomasi Pemerintah perlu memiliki modal sehingga dapat digunakan dalam berdiplomasi dengan pemerintah daerah dari negara lain. Pemerintah Aceh merupakan bagian dari wilayah otonom di Indonesia. Sebelum perjanjian Helsinki Pemerintah Indonesia membuat UU No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh. Hingga saat ini Pemerintah Aceh telah terlibat dalam kerjasama dalam pihak asing baik Pemerintahan atau bisnis teknis, seperti halnya kerjasama dalam Pendidikan seperti universitas dari Swedia, Inggris, Malaysia, Istanbul Turki, dan Jepang. (Novaldi dan Rasanjani, 2020). Dikatakan juga bahwa wilayah Aceh memiliki beberapa kekuatan sebagai modal dalam praktek paradiplomasi, termasuk bencana Tsunami, Wilayah Bekas Konflik, dan Aceh merupakan produsen Kopi terbaik dunia. Dan dalam tulisannya mengatakan bahwa Aceh juga memiliki kekuatan daerah seperti adanya aturan Hukum Islam, Kawasan Wisata Halal. Dengan mempraktikkan paradiplomasi provinsi Aceh bisa menjadi wilayah yang maju.

Tulisan yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam konteks paradiplomasi Aceh berdasarkan MOU Helsinki tahun 2005, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan yang besar untuk terjalinnya kerjasama internasional di bidang pinjaman internasional, perdagangan, investasi, dan

pariwisata. Dalam tulisannya selama ini Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan pihak asing baik urusan Pemerintahan maupun bisnis teknis seperti dengan berbagai universitas asing. Kewenangan untuk melaksanakan urusan paradiplomasi yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh sebagaimana tertuang dalam MOU Helsinki dan UU No 11 Tahun 2006 tentang kelembagaan Pemerintahan di Aceh ternyata lemah, khususnya di struktur organisasi yang menangani urusan Paradiplomasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kecilnya lembaga yang terbentuk di dalam badan Pemerintahan sehingga tidak dapat menjalankan kewenangan dalam peraturan nasional. (Mukti, 2018)

Lembaga yang dibangun untuk menangani urusan paradiplomasi di Aceh hanya berbentuk sub-unit, pada sekretaris daerah, di bawah Kemajuan Gubernur dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Penelitian Humaniora, Banyak sarjana yang melihatnya sebagai masa transisi dari era revolusi ke era pembangunan. Namun hingga 16 Desember 2013 sementara pelantikan Malik Abdullah dilakukan oleh masyarakat Aceh Wakil Gubernur Aceh, Jakarta atau pusat belum mengakui penerapan Qanun tersebut, Menteri Dalam Negeri mengatakan pelantikan wakil Aceh tidak sah karena belum ada Qanun yang cocok dengan pokok-pokok yang dikemukakan Pemerintah, sehingga sampai Pemerintah pusat tidak mengirimkan utusan resmi, kecuali Tim Evaluasi. Meski dianggap ilegal oleh Pemerintah pusat, perwakilan Aceh tetap dipertahankan tampil dalam otoritas berdasarkan Qanun yang dibuat sebelumnya. Pemerintah Aceh menjamin hukum qanun itu dari perwakilan rakyat Aceh tersebut sudah sejalan dengan Perjanjian Damai dalam MOU Helsinki dan sekaligus membuat sumber qanun yang sangat perhatian. Wewenang Paradiplomasi ini menjadi atribut baru LWN yang sangat

strategis bagi Aceh dalam rangka memperluas jangkauan kerjasama internasional (Mukti, 2018). Pemahaman tentang kewenangan kemitraan luar negeri, kata Gubernur Zaini Abdullah yang digunakan Aceh MOU Helsinki tahun 2005 sebagai pedomannya, yang ditafsirkan secara luas, dan tidak berpijak pada Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 atau Perpres Nomor 11 Tahun 2010.

Model diplomasi ini, memberikan elemen penting dalam kegiatan paradiplomasi, yaitu fleksibilitas pragmatis dalam menjalin kerjasama internasional, seperti yang dikemukakan oleh Nue Cornago. Selain dengan menggunakan cara-cara tersebut, Pemerintah Aceh dapat meniru paradiplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan, yaitu penunjukan tenaga honorer untuk kota-kota tertentu di luar negeri, diambil dari warga Korea Selatan yang bertempat tinggal di negara tersebut. Tugas Penasehat Kehormatan ini adalah sebagai penghubung antara berbagai pihak di kota tempat tinggalnya, baik Pemerintah asing maupun pengusaha asing, dan pihak lain untuk menjalin hubungan dengan pihak Pemerintah daerah di Korea Selatan yang telah menunjuknya sebagai posisi ini. Jumlah penasehat kehormatan Gyeongbuk mencapai 99 orang di 48 negara yaitu di negara-negara Asia 25 orang, Eropa 24 orang, Amerika Utara 29 orang, Amerika Selatan 4 orang, Oceania 9 orang, dan Afrika 8 orang penasehat, ditambah utusan perdagangan khusus ditempatkan di Provinsi Henan, Cina.

Tulisan yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti, Tulis Warsito, Surwandono, Idham Badruzaman, dan Ulung Pribadi, dalam artikelnya berfokus pada dua wilayah yang berbeda yang memiliki dua persamaan karakteristik, kedua wilayah ini diakui oleh Pemerintah pusat sebagai otonom secara luas dibanding dengan provinsi lain, eksplorasi aktivisme paradiplomatik dalam Pemerintahan Aceh dan

Catalonia menggunakan aspek manajemen paradiplomatik dan pergerakan politik lokal, jelas bahwa kedua Pemerintah daerah memiliki pola yang sama. Dalam mengatur urusan paradiplomatik mereka Pemerintah daerah telah mengalihkan kendali urusan paradiplomatik dari Pemerintah pusat hingga para pemimpin politik di Pemerintah daerah melalui penggunaan peraturan daerah, khususnya dari Perdana Menteri di Madrid kepada Presiden Generalitet di Barcelona, dan dari Presiden Indonesia Jakarta untuk Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh. Manajemen paradiplomatik oleh wilayah separatis mengikuti pola yang sama termasuk dalam sistem federal dan kesatuan.

Logika paradiplomatik Aceh model bertemu dengan kendala rumit karena sistem politik Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan Spanyol memiliki sistem federal. Perbedaan antara Katalonial Semangat dengan Institusionalisasi paradiplomasi mereka. Paradiplomasi Catalonia telah mencapai tingkat yang relative tingkat kelembagaan yang kuat, sedangkan pelebagaan paradigma Aceh masih berada pada tahap embrio yang lemah (warsito,dkk, 2019). Perbedaan Paradiplomasi Catalonia telah mencapai tingkat yang relative tingkat kelembagaan yang kuat, sedangkan, Catalonia mampu menerapkan semua desain paradiplomatiknya pada tingkat praktis di dunia internasional. forum nasional, tidak sesuai dengan target, sementara Aceh juga tercapai tingkat konseptual yuridis. Dengan merefleksikan pola manajemen paradiplomasi di Catalonia, itu mungkin saja untuk memprediksi arah pergerakan politik lokal Aceh masa depan dan untuk menilai apakah Aceh akan mengikuti model Catalonian, tapi ini akan membutuhkan penelitian dan verifikasi lebih lanjut.

1.5 Landasan Konseptual

Tinjauan Pustaka memuat teori-teori yang digunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian yaitu sebagai tolak ukur atau pembanding dalam menganalisa masalah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teori paradiplomasi.

Teori paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administrasi dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor - aktor sub nasional, institusi politik dan kebijakan politik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena Pemerintah daerah merupakan implementasi dari kebijakan publik. Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara, sebuah diplomasi regional pada tujuannya tidak berusaha mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingan lebih bersifat khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan negara, dan berada pada pengawasan negara. Dalam mengembangkan daerahnya para aktor diberikan kebebasan untuk menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan negara, dan mengikuti sistem internasional yang berlaku, yang menjadikan negara sebagai aktor penghubung yang mendasari terjadinya hubungan tersebut.

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomasi*' menjadi '*Paradiplomasy*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu makna '*the foreign policy of*

non-central government' (Criekemans, 2008). Di kemudian hari paradiplomasi kembali digunakan oleh para ahli. Namun, paradiplomasi ini merujuk pada konsep yang berbeda dari paradiplomasi yang dikemukakan oleh Rohan Butler.

Berawal dari Ivo D. Duchacek dan Panayotis Soldados menggunakan istilah paradiplomasi untuk menunjukkan aktivitas politik diplomatik mikro lintas batas negara yang dilakukan oleh Pemerintah subnasional. Istilah yang mengemuka pada saat itu adalah *microdiplomacy*, yang pada akhirnya disepakati oleh para ahli untuk digunakan istilah paradiplomasi untuk menggantikan istilah mikro diplomasi untuk satu konsep yang sama (Alexander, 2015).

Paradiplomasi di dorong oleh globalisasi yang mana menimbulkan keterkaitan wilayah di seluruh dunia. Pudarnya batas-batas negara, meningkatnya peranan aktor non negara seperti organisasi internasional. Perusahaan multinasional, aktor subnasional seperti Pemerintah kota dalam kancah global. Perkembangan isu yang tidak hanya perlu disikapi oleh Pemerintah pusat tidak perlu disikapi oleh Pemerintah daerah, dampak dari globalisasi yang turut mendorong terciptanya paradiplomasi. Keterkaitan itu dimanfaatkan oleh aktor subnasional seperti Pemerintah kota dalam mencapai kepentingannya. Paradiplomasi didefinisikan sebagai aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah subnasional dari suatu negara dalam berdaulat dalam rangka usaha mendapatkan kepentingan daerahnya. Jika dalam diplomasi aktor yang melakukan aktivitas diplomasi tersebut adalah Pemerintah pusat negara yang berdaulat, maka dalam paradiplomasi aktor yang melakukan aktivitas tersebut adalah Pemerintah daerah.

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing. Keberadaan paradiplomasi telah menjadi sebuah kuat fenomena bersama dengan pembukaan akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor-aktor non negara di arena hubungan internasional. Kerjasama internasional terbentuk karena adanya interaksi internasional yang meliputi bidang - bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan dilegalkan (Zenita, 2015).

Ada tiga faktor pendorong yang menyebabkan suatu aktor dalam hal ini adalah Pemerintah kota dalam melakukan paradiplomasi. Tiga faktor pendorong yang diutarakan oleh Rogier Van Der Pluijm dan Jan Melissen adalah:

1. Kebutuhan Pemerintah kota dalam melayani kepentingan daerah dan masyarakatnya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota dimungkinkan untuk diraih melalui Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah kota melihat peluang dari keterkaitan antar wilayah secara global.
2. Aktivitas warga kota yang mendorong Pemerintah untuk melakukan aktivitas paradiplomasi. Contoh dari hal ini adalah gerakan anti senjata nuklir yang berkembang di berbagai kota di Amerika Serikat dan Britania Raya yang dilakukan oleh warga kota lintas batas negara
3. Solidaritas suatu kota dengan kota lain, Ini biasa terjadi terkait dengan isu yang berkembang di kota tersebut. Contohnya dalam fenomena yang terjadi di tahun 1980an, dimana kemitraan kota kembar yang dilakukan oleh kota-kota di negara barat dengan kota di Afrika Selatan terkait dengan solidaritas kota negara barat kepada kota di Afrika Selatan yang sedang melawan

politik apartheid.

Duchachek menggambarkan paradiplomasi dalam tiga jenis. *jenis pertama* adalah *transborder paradiplomacy*. jenis paradiplomasi ini mengacu pada hubungan kelembagaan, formal atau informal oleh Pemerintah sub-nasional yang berbeda tetapi secara geografis wilayah sub-nasional ini berbatasan langsung. *jenis kedua* adalah *transregional paradiplomacy*., hubungan diplomatik dilakukan antara dua atau lebih pemerintah daerah yang wilayahnya tidak berbatasan langsung tetapi berbatasan langsung dengan segera negara-negara tempat unit-unit sub-naasional tersebut berada. Sedangkan *jenis ketiga* adalah *global paradiplomacy* yang merupakan kegiatan hubungan antara sub nasional pemerintah di dua atau lebih negara yang tidak ada batas. Praktik paradiplomasi erat kaitannya dengan desentralisasi kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Miguel Santos Neves, keberlanjutan dari paradiplomasi dipengaruhi dan masih sering dihubungkan dengan kapabilitas dari Pemerintah Pusat suatu negara dalam menjalankan desentralisasi melalui bentuk otonomi daerah (Neves, 2010).

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertahap mulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data sehingga diperoleh pemahaman atas topik, fenomena atau isu tertentu. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta fakta kerjasama *Sister City* antara Provinsi Aceh dan pemerintah kota lainnya. Dan menitikberatkan pada kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Aceh untuk mengetahui bagaimana Kerjasama yang sudah terjalin dengan pemerintah kota

asing. Dan banyak dari sisi kehidupan manusia yang dapat digali melalui metode ini. J.R. Raco berpendapat bahwa penelitian di bawah rumpun ilmu sosial dan kemanusiaan banyak menggunakan metode kualitatif. Paradiplomasi merupakan fenomena dari adanya kerjasama internasional karena interaksi internasional dalam bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Oleh karena Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Teknik analisis data kualitatif. Permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta yang ada dan kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan menggunakan metode deskriptif untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu fakta dan realita sehingga penelitian ini bersifat analisis-deskriptif (Raco, 2010).

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat variable melekat. Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variable penelitian diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut sugiono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di Tarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah *sister city*, yaitu Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemerintah sub-nasional atau kota yang secara geografis, administrative dab politik yang sepakat untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat dan budaya dan untuk meingkatkan ekonomi daerah.

c. Metode pengumpulan data

1. Riset kepustakaan (*library research*)

Riset kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh teori, data, dan informasi yang diperlukan. Perkembangan perpustakaan telah mengalami digitalisasi sehingga selain perpustakaan konvensional yang menyediakan buku-buku cetak, terdapat perpustakaan elektronik yang menyediakan e-book, jurnal dan literatur lain yang dibutuhkan peneliti.

2. Penelusuran Daring (*online browsing*)

Perkembangan internet yang pesat memungkinkan para akademisi menjadikan media dalam jaringan atau daring/online sebagai salah satu medium penelusuran informasi baik data sekunder maupun data primer yang dibutuhkan peneliti. Data, informasi, atau teori yang dibutuhkan oleh peneliti harus diperoleh dari sumber yang kredible dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Oleh karena itu dalam metode ini peneliti membutuhkan skill pencarian dalam mesin pencari yang menampung basis data salah satunya Google scholar, Scopus, Doaj, Scimago, Jstor, atau proquest.

d. Proses penelitian

a. Pra-riset

Persiapan penelitian terkait tema yang akan diteliti dengan membaca referensi - referensi yang relevan.

b. Pengambilan data

Penelitian ini mengambil informasi dari data sekunder berupa artikel dalam jurnal ilmiah, buku, dokumen, website, yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

c. Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah proses analisis yang bertujuan memperoleh suatu pemahaman melalui serangkaian metode berpikir ilmiah dengan langkah interpretasi.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PARADIPLOMASI

2.1 TSUNAMI ACEH 2004 DAN PENGEMBANGAN AWAL KEBIJAKAN PARADIPLOMASI DI NAD

Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing - masing, kepentingan tersebut akan terpenuhi melalui interaksi antar negara lain melalui kerjasama dan diplomasi. Di Indonesia, Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kepentingan daerahnya sendiri yang kemungkinan akan berbeda dengan kepentingan daerah lain. Secara garis besar kepentingan provinsi Aceh adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan serta peningkatan kualitas ekonomi yang dapat diwujudkan melalui peningkatan Kerjasama dan investasi. Sebelum tahun 2004 kepentingan tersebut sangat sulit untuk dicapai, hingga pada tahun 2004 terjadi bencana Tsunami, dengan terjadinya bencana alam Tsunami telah menarik simpati banyak pihak, maka pemerintah Aceh memanfaatkan kondisi ini untuk mewujudkan kepentingan daerahnya. Bencana memang memberikan kesedihan bagi sebagai manusia, hal ini dikarenakan bencana memberikan kerugian yang cukup besar baik materil dan maupun immaterial. Tsunami yang sebelumnya dianggap sebagai bencana kini dapat berubah menjadi berkah dengan memanfaatkan Tsunami sebagai pendorong untuk mengadakan pembicaraan damai antara GAM dan Indonesia, yang telah berkonflik selama lebih dari 30 tahun. Bencana Tsunami menjadi alat diplomasi yang efektif dan aktif menyadari perjanjian dalam negosiasi perundingan. Diplomasi bukanlah suatu hal baru bagi masyarakat Aceh.

Sejak masa kerajaan Aceh abad ke-16, kerajaan Aceh telah melakukan hubungan diplomatic dengan pihak-pihak luar, baik di Kawasan Nusantara maupun mancanegara. Pada abad ke 19 dan 20 Aceh resmi bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awalnya semua bentuk Kerjasama hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. namun pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri dalam bentuk Kerjasama dll. Salah satu daerah yang memiliki kewenangan adalah provinsi Aceh, dan ditambah dengan penguatan dari hasil penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 membuat Pemerintah Aceh memiliki peluang besar untuk mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk dalam melakukan hubungan luar negeri dengan daerah - daerah di negara lain “sister city” (Novialdi, 2016).

Dalam undang undang no. 31 tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan Kerja sama luar negeri ini tertuang dalam pasal 42 ayat (1) bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah (PEMDA) juga dapat membuat perjanjian Kerjasama teknis antara lain bantuan kemanusiaan, Kerjasama penerusan pinjaman/hibah, Kerjasama penyertaan modal dan Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan melakukan Kerjasama internasional telah dimulai sejak disahkan Undang-undang tentang pemerintah daerah pada tahun 1999 atau di kenal sebagai undang-undang otonomi daerah dan penggantinya pada tahun 2004 dan 2014. Dalam hal Kerjasama internasional dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh, itu diatur secara khusus oleh undang-undang tersendiri. Dalam praktik, pemerintahan di daerah telah

menjadi kebutuhan karena globalisasi yang telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan akan tertinggal jika tidak membaaur dengan dunia internasional. Dalam kewenangan yang luas dari pemerintah pusat, provinsi Aceh harus memiliki modal yang besar dalam menjalin hubungan luar negeri. Kerjasama *sister city* merupakan sebuah Kerjasama yang berkembang dari adanya spririt globalisasi yang mana seluruh aktor dapat terlibat dalam konstelasi hubungan internasional.

Secara global, isu mengenai otonomi daerah bangak mengemuka di negara-negara utamanya yang menyangkut persoalan penyebaran kekuasaan sebagai manifestasi rill dari demokrasi. Dengan kata lain otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan konsep areal devison of power yang membagi kekuasaan secara vertical suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi oleh pemerintahan pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Eksistensi kerjasama *sister city* yang semakin berkembang, juga turut ditentukan oleh perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di berbagai negara. Kerjasama *sister city* merupakan bentuk kerja sama yang fleksibel terutama dalam bidang yang dikerjasamakan. Hal ini tergantung dari kebutuhan dan preferensi masing-masing kota untuk digunakan. Fleksibilitas tersebut bertujuan untuk menciptakan keluaran dan hasil kerja sama yang dinilai produktif dan konstruktif. Produktif dalam hal ini berarti memberikan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak. Sederhananya, jika salah satu sektor yang dinilai berhasil mengalami kemunduran, maka bukan berarti kerjasama. Namun konsentrasi dapat beralih pada sektor lain yang lebih strategis

dan memiliki nilai keunggulan komparatif tertentu (Salma, 2015).

Dalam konteks Indonesia, fakta tentang konsep *sister city* dalam paradiplomasi mengemukakan setelah undang-undang tentang pemerintah daerah disahkan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah Aceh menempatkan nilai-nilai islam sebagai asas pertama dan utama dalam segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai islam dalam diplomasi atau yang dikenal dengan diplomasi islam adalah seperangkat nilai yang diakui secara konseptual dan faktual. Sebagai pemerintah yang menyatakan penerapan Syariah Islam belum mampu menarik simpati Kerjasama dengan negara-negara yang menerapkan hukum islam seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan negara-negara arab lainnya untuk berinvestasi di Aceh, atau secara signifikan menjalin Kerjasama di bidang yang lain seperti pendidikan, perdagangan, pariwisata, alih teknologi dll. UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk melakukan kewenangan hubungan internasional dan menentukan bidang - bidang yang akan dilakukan Kerjasama. Berdasarkan peraturan Menteri luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 yang menyatakan bahwa peran Kementerian Luar Negeri adalah koordinator, inisiator, informan, mediator, promotor, fasilitator, pelindung, dan konsultan.

Berdasarkan pengalaman praktisi penyusunan perjanjian Kerjasama biasanya dilakukan dalam 5 tahap. *Tahap pertama* perencanaan, yaitu tahap internal Pemerintah daerah dalam mempersiapkan bahan materi dan lapangan dan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak asing. *Tahap kedua* komunikasi, komunikasi luar negeri dan penyusunan draft *Memorandum of Understanding* (MoU). Materi Kerjasama yang telah di siapkan pada tahap perencanaan secara garis besar

dituangkan dalam draft MoU yang disusun dengan pihak asing. Padahal MoU bukan perjanjian Kerjasama dalam arti “Kesepakatan”. Namun hal ini sering dipilih oleh RI/daerah otonom karena tidak memerlukan pengesahan dari DPRRI. *Tahap ketiga* mengajukan persetujuan Kerjasama antara daerah dengan Pemerintah daerah atau pihak asing ke Kementrian Dalam Negeri. *Tahap keempat* pembahasan rencana detail perjanjian Kerjasama drngan pihak asing di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan. DPRD dapat menolak dan membatalkan rencana Kerjasama meskipun MoU telah dibuat antara Pemerinth daerah dan pihak asing. *Tahap kelima* penandatanganan perjanjian Kerjasama luar negeri antara daerah dengan pihak asing setelah rencana Kerjasama tersebut disetujui oleh dewan. (Ali, 2010)

2.2 LANDASAN YURIDIS PEMPROV NAD DALAM PARADIPLOMASI

Praktik paradiplomasi telah ada sejak lama di negara-negara maju, dan merupakan bagian dari kelanjutan sejarah integrasi di negara masing-masing. Namun, di Indonesia praktik dan kajian paradiplomasi belum terlalu berkembang. Kajian awal tentang peran dan kewenangan Pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan kerjasama luar negeri baru dilakukan oleh Sidik Jatmika pada tahun 2001 yang menitikberatkan kajian pada penerapan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah (Sidik, 2001).

Berikut ini adalah telaah yang akan menguraikan tentang dasar-dasar hukum kewenangan melakukan hubungan dan Kerjasama luar negeroi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang berlaku saat ini, berupa Undang - Undang, peraturan Menteri Luar negeri dan Perturan Menteri Dalam Negeri:

a. Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Kepastian hukum mengenai wewenang daerah otonomi daerah yang melakukan Kerjasama luar negeri secara jelas sudah diatur dalam UU No 37 tahun 1999, adapun beberapa pasal yakni;

- ◆ Pasal 1, ayat (1); “hubungan luar negeri adalah sikap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau Lembaga-lembaganya, Lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara”.

Pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri menunjukkan Menteri menyelenggarakan Sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Peraturan mengenai Kerjasama daerah dalam UU No.37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri maka ketentuan mengenai Kerjasama daerah ini perlu dimasukkan ke dalam UU tersebut dengan memperhatikan substansi materi yang ada di peraturan perundang-Undangan lain agar tidak terjadi disharmonisasi antara ketentuan mengenai Kerjasama daerah yang akan diatur dalam RUU tentang Hubungan Luar Negeri dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang lainnya (Julia, Sondakh, Karisoh, 2020).

b. Undang Undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Khusus

Otonomi daerah memiliki sejarah Panjang di Indonesia dan merupakan salah satu unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan public Indonesia. Otonom daerah dapat dimengerti sebgai proses pemberian kekuasaan

atau otoritas kepada masing masing daerah atau provinsi yang ada di aceh untuk mengurus daerahnya. otonomi daerah merupakan sebuah proses desentralisasi yang dalam proses tersebut, pemerintah daerah masing-masing diberikan sebuah otoritas atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus, mempertahankan dan membangun serta mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pusat. Selain dari hal tersebut, pemerintah daerah juga memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan daerah masing-masing berdasarkan peraturan yang berasal dari pemerintahan pusat. Otonomi daerah sendiri merupakan suatu hak sekaligus kewajiban pemerintah daerah. (Mukti, 2013)

Aceh merupakan bagian dari wilayah otonomi di Indonesia, lahirnya undang undang ini dilatar belakangi setidaknya oleh dua faktor, yaitu terdapat di Aceh dan di tingkat Nasional. Yang pertama, berkaitan dengan Konflik Aceh yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976. Sedangkan yang kedua, berkaitan dengan adanya Reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara Pusat dan daerah. Undang Undang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada akhirnya di sahkan sebagai UU Nomor 8 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam UU Nomor 18 tahun 2001 pasal 31 (1) dinyatakan bahwa “ketentuan pelaksanaan Undang Undang ini menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah,” (2) dinyatakan bahwa “ketentuan pelaksanaan Undang0Undang ini yang

menyangkut kewenangan Pemerintah provinsi Aceh ditetapkan dengan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

c. Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang undang ini dibuat untuk pemerintah Aceh sebagai Pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang disahkan untuk menindak lanjuti hasil perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Aceh mendapatkan kewenangan khusus untuk menjalin hubungan Kerjasama dengan Lembaga atau badan Luar negeri baik dalam kegiatan seni, budaya dan olahraga internasional. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem NKRI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK). Praktik paradiplomasi Pemerintah Aceh mampu menjalin kerjasama dengan Pemerintah provinsi luar negeri sesuai dengan Undang- undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk menjalankan praktik paradiplomasi Pemerintah perlu memiliki modal sehingga dapat digunakan dalam berdiplomasi dengan pemerintah Sister City. Mengingat hal ini Aceh merupakan daerah otonomi khusus dan telah mendapatkan kewenangan khusus. Kewenangan tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan mandiri tanpa harus ada persetujuan dari Pemerintah pusat kecuali masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya kewenangan ini Pemerintah Aceh dapat melakukan Kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan kerjasama paradiplomasi di wilayah Aceh.

d. Peraturan Daerah / Qanun No 11 tahun 2002

Salah satu faktor hukum yang menunjukkan konsistensi antara Pemerintah pusat dan daerah adalah terbitnya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang perwujudan otonomi daerah, yaitu pemberlakuan syariat islam di Aceh. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Syariah Islam yang akan menegakkan syariat Islam secara komprehensif (M. Asfar, 2006: 117). Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh untuk menambah petugas polisi Syariah Islam telah dilakukan, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra namun masyarakat dan Pemerintah Aceh tetap menjalankansyariat Islam.

Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam konteks sistem hukum nasional Negara kesatuan Republik Indonesia. Selain memiliki kewenangan khusus di bidang penerapan Syariah islam, Pemerintahan Aceh juga memiliki keunikan dalam bidang politik Kerjasama luar negeri. Kewenangan di bidang politik ini khas Aceh dengan disahkannya Partai politik lokal sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang hanya berlaku di Aceh. Dalam kewenangan di bidang Kerjasama luar negeri, secara khusus diatur dalam UU tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintahan Aceh dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), mengenai kewenangan tersebut Pemerintah Aceh dapat melakukan Kerjasama dengan pihak asing. Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung. Dalam pasal 9 ayat (2), untuk menjaga keutuhan kepentingan politik nasional, pemerintah Aceh melaksanakan Kerja sama luar negeri.

BAB III
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NAD DALAM
PARADIPLOMASI

3.1 KERJASAMA YANG BERJALAN ANTARA PEMROV NAD DAN
PEMERINTAH KOTA MITRA (SISTER CITY)

Kerjasama internasional pada masa sekarang tidak dapat diabaikan oleh para aktor hubungan internasional, karena adanya sifat saling ketergantungan para negara untuk memenuhi nasionalnya. Menurut k.J Holsti, kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang timbul dan akhirnya diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, dan kemudian masing - masing pemerintah saling melakukan pendekatan dan membawa usul penanggulangan masalah, menyimpulkan bukti - bukti teknis untuk membenarkan satu usul lainnya. Dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling perhatian yang dapat menguntungkan dan memuaskan semua pihak (Holsti, 1999). Dalam konteks kewenangan pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri, dalam bentuk Kerjasama Paradiplomasi maka pelaksana Kerjasama ini yaitu pemerintah Sub-nasional yang menghadapi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi diharapkan dapat memperdalam terjalinnya hubungan Kerjasama. Pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah atau paradiplomasi di Indonesia baik provinsi atau kabupaten/kota dapat dikelompokkan dapat menjadi kategori kedua, yang dimana pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dan Kerjasama dengan pihak asing hampir selalu menggunakan MoU yang mencakup bidang Kerjasama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pertanian, dll. Fenomena pemerintahan ini telah

memberikan suatu daerah sebuah wewenang untuk menjalankan hubungan luar negeri dengan menjalankan Kerjasama saat ini yang sering terjadi. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah sendiri tidak hanya dijalankan tanpa sepengetahuan pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah tetap meminta persetujuan kepada pemerintah pusat ataupun DPRD setempat akan kegiatan maupun Kerjasama yang dilakukannya berkaitan dengan pihak asing yang sifatnya pemerintahan negara asing, investor asing, MNC dan lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk Kerjasama yang berjalan antara pemerintah provinsi Aceh dan Pemerintah kota mitra *sister City*;

1. Kota Banda Aceh - Higashimatsushima (Jepang)

Aceh dan Jepang sama - sama pernah mengalami Bencana tsunami, Kota Banda Aceh mengalami Tsunami dan gempa yang sangat dahsyat pada tahun 2004 yang telah menghancurkan hampir sebagian dari wilayah kota. Sementara Kota Higashimatsushima mengalami kejadian serupa yang mengakibatkan kerusakan parah pada Maret 2011. Kesamaan yang dialami menjadi dorongan bagi kota Banda Aceh dan Higashimatsushima untuk melakukan Kerjasama. Kerjasama ini dalam bentuk proyek yang disebut *CoMU Project* yaitu (*Community Based Mutual Reconstruction Acceleration*) yang sudah berlangsung sejak April 2014 dan berakhir pada Maret 2016. Ini adalah sebuah program percepatan rekonstruksi berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal Banda Aceh dan kota Higashimatsushima dalam rangka pertukaran informasi dan berbagai pengalaman dalam melakukan proses rehabilitasi pasca gempa dan Tsunami. Proyek Kerjasama ini berada di bawah tanggung jawab JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*). JICA

bekerjasama dengan suatu asosiasi yang didirikan oleh kota Higashimatsushima yaitu HOPE (*Higashimatsushima Organization for Progress and Economy, Education, Energy*) (Aulia, Iqbal; 2018)

2. Kota Banda Aceh - Samarqand (Uzbekistan)

Kota Banda Aceh dan Samarqand (republik Uzbekistan) sama-sama memiliki latar belakang sejarah umum dan kesamaan sosial - budaya yang kuat. Dengan adanya kesamaan ini pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Kota Samarqand (Uzbekistan) mendorong kedua daerah ini untuk membangun kemitraan sister city. Kerjasama ini sudah ditandatangani oleh walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin Mr dan Kota Samarqand akbar Shukorov Savarovich pada 31 Mei 2011. Penandatanganan Kerjasama tersebut diharapkan bisa memperkuat hubungan antara Indonesia dan Uzbekistan. Terkait MoU, kota Banda Aceh dan Samarqand setuju pada beberapa Kerjasama di beberapa bidang seperti, perdagangan, investasi, pariwisata, industri kecil dan menengah, pengelolaan dan pengembangan perkotaan, pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. Salah satu yang disebutkan dalam MoU adalah perdagangan dan industri. Dimana perdagangan merupakan aspek penting yang dapat mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk melaksanakan setiap bidang - bidang kegiatan yang disebutkan dalam MoU, Banda Aceh dan Samarqand sepakat dalam membentuk kelompok Kerjasama. Kerjasama ini akan mengadakan pertemuan tahunan di Banda Aceh atau di Samarqand. Sebelumnya pemerintah daerah Banda Aceh dan Samarqand pernah bekerjasama untuk mengadakan kegiatan dalam bidang pariwisata, kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2014 (Lyndi, Iqbal; 2018).

3. Aceh - Andaman dan Nicobar (Port Blair, India)

Secara geografis, Aceh memiliki jarak yang dekat dengan India, terutama kepulauan Andaman dan Nicobar yang merupakan wilayah persatuan India di ujung tenggara teluk Benggala. Kedekatan ini dapat menjadi peluang bagi provinsi Aceh untuk mengembangkan potensi ekonominya dengan menciptakan konektivitas bisnis yang baik. Pemerintah India membuat sejumlah pulau di wilayah Andaman dan Nicobar sebagai lokasi untuk *eco-tourism*. Pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur skala besar untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di kepulauan Andaman dan Nicobar. Bandara Port Blair, bandara utama di kepulauan Andaman sedang di renovasi, bandara yang bernama Veer Savarkar Internasional Airport. Pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan berbagai bahan material. Peluang ekspor kebutuhan material ke wilayah kepulauan Andaman dan Nicobar dari Indonesia khususnya provinsi Aceh. *Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle (IMT- GT)* adalah inisiatif Kerjasama sub-regional yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Thailand pada tahun 1993 untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi di provinsi - provinsi yang kurang berkembang. Kegiatan IMT-GT tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup dalam sub-regionalnya, tetapi juga membantu mencapai integrasi regional yang lebih luas. Pada Oktober 2018 Badan Pengkaji dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI membentuk tim Intelijen pasar. Tim ini bertugas untuk menilai peluang Kerjasama perdagangan barang dan jasa antara Aceh - Kepulauan Andaman dan Nicobar serta Chennai di India.

Dalam meningkatkan Kerjasama ekonomi, tidak hanya menekan pada sector perdagangan barang, tetapi pada sector perdagangan jasa seperti pendidikan dan pariwisata. Pengembangan pariwisata di Andaman dan Nicobar dapat dihubungkan dengan potensi pariwisata di Aceh. Kemudian di bidang pendidikan, perguruan tinggi di Aceh dapat menjalin Kerjasama di bidang akademik dan penelitian dengan perguruan tinggi di port Blair dan negara bagian lainnya di India. Dalam kunjungan YM. Pradeep Kumar Rawat ke Aceh pada 2019, Dubes menyempatkan diri singgah di Universitas Almuslim. Tujuan Dubes tersebut adalah salah satunya untuk menyampaikan apresiasi yang mendalam dari pemerintah India atas konferensi Internasional pada 2016, yang mendiskusikan peluang Kerjasama bisnis dan perdagangan antara India dan Aceh (Sofyan, Affan, Basri, dan Miftahuddin, Ervilita, 2019).

3.2 KERJASAMA NAD DAN PEMERINTAH KOTA MITRA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan sosial yang ada pada masyarakat dunia. Penduduk dunia diramalkan pada tahun 2050 mencapai 9 miliar membutuhkan Pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan menjadi bagian dari tolak ukur kemajuan suatu negara/daerah. Menyadari bahwa pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka Pemerintah Aceh Bersama kalangan swasta terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan Pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui peningkatan program pendidikan yang meliputi pengembangan dan perbaikan

sarana Pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya (Harun, 2015). Dalam bidang Pendidikan di Aceh, Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas Pendidikan daerah dengan menetapkan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam no 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan ini dijalankan dalam rangka menerapkan sistem Pendidikan yang berlandaskan syariat islam (karnila, 2019). Berikut Kerjasama bidang pendidikan oleh Pemerintah Aceh dengan Universitas dari berbagai Negara yaitu;

1. Aceh - Turki

a. Universtas Syiah Kuala dengan Turki

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, peluang yang semakin besar bagi Unsyiah untuk memperluas jaringan Kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri. Kerjasama yang dimaksud adalah agar Unsyiah dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi. Kerjasama dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar perguruan tinggi atau institusi lain. Kerjasama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan program pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, gelar ganda, gelar Bersama, magang, seminar, beasiswa dan pemanfaatan Bersama sebagai sumber daya akademik di kedua belah pihak. Sedangkan kerjasama non akademik berupa kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara yang ada pada Unsyiah, dan berupa Kerjasama dalam penyediaan jasa dan royalti serta bentuk lain yang ditujukan pada peningkatan layanan oleh Unsyiah dan manfaat Bersama bagi Pihak Mitra.

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

pedoman kerjasama Unsyiah dan pelaksanaan kerjasama adalah:

- a. Undang - undang no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
- b. Undang - undang no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.
- c. Undang - undang no 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, Lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Terdapat lima mitra Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan Turki.

Universitas tersebut antara lain yaitu:

Tabel 1. Universitas-universitas Turki dan Mitra Kerjasama Unsyiah

NO.	Universitas dan Mitra Kerjasama
1	Karabuk University
2	Dicle University
3	Suleyman Demirel University
4	Fatih University

Lembaga - Lembaga di atas bekerjasama dengan Unsyiah dalam berbagai jenis Universitas. Dengan Lembaga - Lembaga yang di sebutkan di atas, Adapun tujuan Kerjasama Unsyiah dengan beberapa universitas di Turki adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas akademik institusi sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi.

2. Aceh - India

a. Universitas Ubudiyah Indonesia dengan Sri Ramakrishna Institute of Technology

Dalam meningkatkan pengembangan Kerjasama luar negeri dan mutu layanan akademik antar universitas, universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh menjalin Kerjasama dengan Sri Ramakrishna Institute of Technology India. Jalanan Kerjasama kedua universitas ini ditandatangani dengan penandatanganan MoU oleh rektor UUI Prof. Adjunct Marniati, SE, M. Kes mengatakan bahwa Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pengembangan Bersama mutu akademik kedua universitas dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi informasi dan Kesehatan yang merupakan program unggulan di kedua universitas. Selain kerjasama antara kedua universitas, Adapun penandatanganan MoU antara PT. Caisario Royal Pratama dengan Rhama Krishna Company. Dalam kerjasama layanan rumah sakit ini diwakili oleh Dedi Zefrizal, ST yang merupakan ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia, dan Sri Ramakrishna Company diwakili oleh Mr. Ram selaku CEO Sri Ramakrishna Company. Kerjasama ini berjalan dengan lancar, harapan keduanya adalah dengan adanya Kerjasama yang berlanjut dan terus dapat mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik.

3. Aceh - Malaysia

a. Universitas Ubudiyah Indonesia dengan MAHSA University Malaysia

Dalam rangka mengembangkan program Kerjasama dengan universitas bergengsi di luar negeri, Universitas Ubudiyah Indonesia Kembali menjalin Kerjasama melalui penandatanganan MoU dengan salah satu Universitas bergengsi di Malaysia yaitu MAHSA University Malaysia. Mahsa University merupakan salah satu Universitas terfavorit di Malaysia yang mempunyai Sembilan fakultas Favotit diantaranya seperti faculty og Nurshing Midwifery, Faculty of Business, Finance and hospitally, Faculty of Engineering and Information Technology, Faculty of Pharmacy, masih banyak lagi fakultas yang favorit.

Dalam perumusan Kerjasama tersebut rektor Universitas Ubudiyah Indonesia Prof. Adjunct Marniati, M.Kes yang mengadakan rapat khusus dengan Professor Tan Sri Dr. Hj. Mohamed Haniffa yang merupakan pendiri sekaligus executive chairman dari MAHSA University. Kerjasama antara UUI dan MAHSA University memfokuskan dibidang program Double Degree untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan kebidanan, Ilmu Farmasi dan juga Ilmu Komputer antara UUI dan MAHSA University. Kerjasama ini memfokuskan untuk program Training Tenaga Kerja Bidan akan dikirimkan Ke Arab Saudi. Prof. Ajunct Marniati, M.Kes menjelaskan dengan ditandatangani kesepakatan Kerjasama MoU dengan MAHSA University maka semakin membuka peluang bagi para mahasiswa UUI untuk mendapatkan peluang bekerja yang lebih besar

diluar negeri dan juga mendapatkan ilmu serta sistem pendidikan yang berstandar internasional.

4. Aceh - Jepang

a. Universitas Syiah Kuala dengan Kobe University

Universitas Syiah Kuala melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi asal jepang yaitu kobe University, dalam pengembangan pendidikan kedua Universitas ini di sepakati dan ditandatangani oleh rektor Unsyiah yaitu Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dengan Dekan Fakultas Teknik Kobe University oleh Prof. Dr. Tomiyama Akio di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Unsyiah sangat menyambut baik kesepakatan Kerjasama ini, karena selama hubungan Antara Unsyiah dan perguruan lainnya di Jepang juga terjalin dengan baik. Selain itu aceh dan jepang sama sama pernah mengalami bencana Alam yaitu Tsunami. Prof. Tomiyama mengatakan ucapan terima kasih kepada Unsyiah karena telah ingin melakukan kesepakatan Kerjasama secara spesifik terkait Double Degree program in Master Disaster Science, penelitian Bersama, summer school program, dan pertukaran mahasiswa dan dosen. Peluang Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pengembangan mutu pendidikan pada kedua universitas.

3.3 KERJASAMA NAD DAN PEMERINTAH KOTA MITRA DALAM BIDANG EKONOMI

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kota Banda Aceh yang diberikan status daerah otonomi khusus yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan meupakan provinsi paling barat di Indonesi. Aceh pernah mengalami Tsunami

yang dahsyat yang memakan banyak korban pada 2004, dengan terjadinya bencana ini pemerintah memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan diplomasi dengan negara internasional. Bencana Tsunami memang memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan provinsi aceh. Berdasarkan penelitian ada beberapa alur yang mengantarkan kepada peningkatan perkembangan ini. Setelah terjadinya bencana Tsunami pada tahun 2004, Aceh dapat menarik banyak perhatian dan simpati dari pihak lokal maupun internasional, kemudian lahir lah solidaritas dari pihak tersebut untuk membantu dan memulihkan provinsi aceh seperti semula.

dimulai dengan lahirnya perjanjian Mou Helsinki pada tahun 2005, dan bantuan secara bertahap datang dari seluruh dunia untuk membantu aceh yang terpenting perjanjian damai antara GAM dan RI. Keamanan Di Aceh terus meningkat, hingga dapat menarik banyak pihak lokal dan asing untuk bekerja sama dan berinvestasi di Aceh. Pemerintah aceh memiliki visi untuk mewujudkan Aceh yang bermartabat, sejahtera, adil dan mandiri. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah membuat program Prioritas Pembangunan Aceh di bidang budaya dan Pariwisata. Pemerintah aceh mendorong semua pihak yang terkait untuk percepatan pembangunan budaya dan ekonomi aceh melalui penguatan nilai-nilai budaya dan pengembangan industri pariwisata yang di dukung oleh keragaman seni budaya dan keindahan alam aceh. Beberapa Kerjasama Antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kota negara lain dalam bidang ekonomi;

1. Kerjasama Aceh - Port Blair

Pembangunan budaya dan pariwisata merupakan bagian dari proses pembangunan daerah dan pembentukan karakter masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur, dan beradab. Berbagai upaya terus dilakukan

pemerintah untuk mengembangkan budaya dan pariwisata di Aceh. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan budaya dan pariwisata di aceh adalah merencanakan pembukaan konektivitas udara (*air Connectivity*) antara Banda Aceh dan Port Blair, india. Pembangunan *Ari Connectivity* antara Banda Aceh dengan Port Blair juga sejalan dengan rencana Pemerintah india yang ingin mengembangkan pulau - pulau terluarnya seperti kepulauan Andaman - Nicobar. Adapun beberapa proyek pembangunan yang di rencanakan pemerintah India di Kepulauan Andaman - Nicobar membutuhkan material dengan jumlah yang besar.

Kebutuhan terhadap bahan - bahan material ini akan di ekspor dari Aceh. Kebutuhan ini akan menjadi peluang bisnis dalam Kerjasama perdangan antara aceh dan India. Adanya Kerjasama perdagangan antara aceh dan india meningkatkan kebutuhan akan konektivitas antara aceh dan india. Pemerintah aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mendukung pembukaan konektivitas udara di Banda Aceh dan Port Blair, india. Rencana pembukaan konektivitas antara Aceh dengan Port Blair, India merupakan hasil pertemuan tingkat tinggi antara perdana Menteri India dan Presidnn Indonesia.

Dalam Kerja sama ini rencananya akan diterbitkan dua izin, *yang pertama* adalah perdagangan Eksport-Import antara Aceh dengan kepulauan Andaman dan Nicobar. *Kedua*, rencana Eksport-Import yang akan ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan transportasi laut dan transportasi udara. Rencana pembukaan kenektivitas udara antara Aceh dan Port Blair dinilai sangat baik. Menurut Deputi Komersial dan Investasi BPKS, diharapkan konektivitas ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke aceh baik untuk wisata maupun

bisnis sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Aceh (Sofyan, Affan, Basri, Miftahuddin, Ervilita; 2019).

2. Kerjasama Aceh - Timur Tengah

Indonesia-Middle East Update merupakan salah satu bentuk Kerja sama antaram Indonesia, khususnya aceh dengan negara-negara Timur Tengah melalui IMEU. IMEU merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Timur Tengah. Kegiatan Kerjasama ini meliputi pertemuan antar pengusaha local dan pengusaha Timur tengah pada oktober 2016 di Banda Aceh. Salah satu pengusaha dari Timur Tengah yang Bernama Bara Ali Aderrahmane menanamkan modal untuk membangun Hotel bintang 4 di pulau Sabang. Dalam mendukung Kerjasama ini, pemerintah melalui KBRI dan pemprov Aceh telah mengintensifkan komunikasi antara pihak local dengan Bara Ali. Pemerintah kota Sabang dan Bara Ali menyetujui dan menandatangani MoU untuk Kerjasama pembangunan Hotel Di sabang pada februari 2016. Adapun pengusaha dari peserta IMEU dari Dubai Mohamed I.M. Farajallah mengunjungi Aceh untuk menjajaki Kerjasama bisnis property pada tahun 2016. Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Aceh terus mendorong para pengusaha internasional untuk berinvestasi dan bekerjasama dengan para pengusaha local ataupun daerah (Hidayatulloh; 2017).

3. Kerjasama Aceh - Phuket

Phuket adalah sebuah pulau dan juga sebuah provinsi di Thailand. Penerbangan ke pulau Phuket dilayani oleh Bandara Internasional Phuket yang

terletak di bagian utara pulau. Pemerintah Thailand mendorong agar wisatawan dapat menjalin hubungan dengan negara lain. Tujuan pemerintah Phuket adalah agar wisatawan yang datang ke Phuket dapat menikmati banyak tempat lain di Thailand. Budaya Thailand dapat menjadi faktor untuk mendorong pemerintah daerah dan terus mengembangkan Kawasan budaya di Thailand. Terkait rencana pembukaan Air Connectivity antara Banda Aceh dan Phuket, Pemerintah daerah Phuket memberikan dukungan penuh. Pemerintah Thailand melakukan pengembangan pariwisata Phuket dengan mempromosikan keunggulan dan keunikan pulau tersebut.

Rencana pembukaan Konektivitas Udara harus memiliki ekonomi yang luas, rencana pembukaan ini tidak hanya untuk tujuan pariwisata. *Director of chamber of Commerce Phuket Island* menyebutkan bahwa yang banyak berperan dalam pembukaan konektivitas udara adalah Aelines. Dengan adanya rencana pembukaan *Air Connectivity* antara Banda Aceh dan Phuket memberikan peluang yang menguntungkan bagi keduanya. Dalam mengembangkan pariwisata di Phuket, *Tourist Association Thailand* bekerjasama dengan TAT (*Tourist Authority of Thailand*) untuk menyambut wisatawan asing. Peningkatan hubungan Kerjasama di bidang perdagangan dapat berdampak pada sektor lain dan salah satunya adalah Kerjasama dalam rangka pembukaan *Air Connectivity*. Pembukaan *Air Connectivity* ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia untuk dalam memanfaatkan jalur laut untuk menghubungkan perdagangan internasional (Sofyan, Affan, Basri, Miftahuddin, dan Ervilita, 2019).

3.4 ANALISIS KERJASAMA SISTER CITY

Hubungan Kerjasama yang dilakukan pemerintah Aceh dan pemerintah kota asing merujuk pada Global Paradiplomacy, mengingat hubungan diplomasi yang dilakukan oleh kedua kota berasal dari negara yang berbeda. Konsep paradiplomasi telah dikemukakan oleh pananayotis Saldatos dan dikembangkan oleh Ivo Duchacek yang menjadi pendekatan untuk menjelaskan permasalahan hubungan internasional oleh aktor sub-nasional (liu et al, 2015). Potensi peluang Kerjasama yang dilakukan antar kota dan provinsi dari kedua negara bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan budaya, dan saling menjalin kerjasama di berbagai bidang secara erat, seperti bidang pendidikan dan ekonomi pemprov aceh menciptakan dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dan menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan.

Di tengah gambaran arus globalisasi yang membawa efek pada dunia, maka konsep paradiplomasi global sendiri khususnya pada *Sister city* yang dilakukan oleh daerah otonom adalah dengan syarat adanya kesamaan budaya, visi, misi, kota pariwisata dan kesamaan lainnya antara negara sub-nasionalnya. Dengan adanya Kerja sama *Sister City* atau konsep paradiplomasi, pemerintah provinsi aceh akan terus menjadi pusat perhatian bagi seluruh negara internasional khususnya pemerintah daerah negara asing pasca Tsunami untuk melakukan Kerjasama di bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Salah satu peran pemerintah Aceh sebagai aktor paradiplomasi / *Sister City* adalah menciptakan kota dengan SDA dan pariwisata yang indah dan berkualitas untuk menarik para investor asing.

Dari beberapa praktik kerja sama *sister city* yang telah penulis sebutkan maka peran pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah pasca tsunami 2004 dengan menjalin Kerjasama dan diplomasi dengan beberapa pihak lokal, nasional bahkan internasional. Faktor yang mempengaruhi sikap daerah terhadap pelaksanaan kewenangan paradiplomasi adalah adanya sumber daya dari daerah dalam melaksanakan urusan kerjasama luar negeri baik SDM maupun dukungan keuangannya. Namun, faktor selanjutnya adalah visi kepemimpinan kepala daerah dalam melihat peluang global untuk memajukan pembangunan daerah.

Keberhasilan Kerjasama berdampak positif bagi pemprov aceh dan beberapa mitra yang sudah terjalin. Beberapa Kerjasama antara pemprov aceh pada bidang pendidikan membawa pengaruh dan perubahan dalam bidang social, ekonomi, dan budaya. Pendidikan menjadi tolah ukur kemajuan suatu negara maupun sub-nasional. Dari Kerjasama bidang pendidikan yang penulis sebutkan yang menjadi peran dalam penelitian ini adalah Universitas syiah Kuala yang melakukan Kerjasama mitra dengan beberapa perguruan tinggi dari berbagai negara sub-nasional. Sedangkan Kerjasama bidang ekonomi, pemprov aceh banyak membuka peluang investasi di aceh terkhususnya pada industri pariwisata di aceh bagi beberapa negara sub-nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam dan menarik investor-investor asing. Untuk meningkatkan industry pariwisata harus di dukung dengan adanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Sister City dapat membantu dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi, khususnya dalam paradiplomasi. Untuk melakukan hubungan kerjasama yang baik antar negara maka negara memerlukan cara sebagai proses untuk memperjuangkan kepentingan masing - masing. Salah satu faktor pendukung yang efektif merupakan komunikasi, karena dalam hubungan kerjasama sering disebut dengan diplomasi. Tujuan Pemerintahan daerah melakukan paradiplomasi adalah untuk menarik investasi, melakukan hubungan dengan perusahaan multinasional di wilayahnya dan mewujudkan peningkatan ekspor. Daya tarik Aceh meingkat dan hubungan luar negerinya pun semakin meningkat. Setelah peristiwa tsunami yang melanda Aceh pihak negara asing dengan mudah masuk ke Aceh dengan alasan kemanusiaan. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman tata cara Kerjasama dengan Lembaga atau badan di luar negeri. Tsunami di Aceh memang telah menciptakan sebuah ruang kesadaran sosial dan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan provinsi Aceh. Bencana ini dapat menarik banyak simpati dari pihak lokal maupun internasional. Tsunami menjadi alat diplomasi yang efektif dan secara aktif mewujudkan kesepakatan dalam perundingan. Dalam kasus Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh secara

khusus diatur melalui undang-undang tersendiri. Dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena arus globalisasi yang telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Pelaksanaan kkerjasam luar negeri oleh pemerintah daerah atau paradiplomasi di Indonesia baik provinsi atau kabupaten/kota dapat dikelompokkan dapat di kelompokkan menjadi kategori kedua, dyang dimana pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dan Kerjasama dengan pihak asing hamper selalu menggunakan MoU yang mencakup bidang Kerjasama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pertanian, dll. Fenomena pemerintahan ini telah memberikan suatu daerah sebuah wewenang untuk menjalankan hubungan luar negeri dengan menjalankan Kerjasama saat ini yang sering terjadi. Kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan sebuah penanda perubahan. Hubungan transnasional yang terjadi di Kawasan internasional memungkinkan setiap aktot untuk memaksimalkan hasil dalam melakukan hubungan diplomasi dengan pihk asing. Dari telaah Kerjasama yang telah dilakukan secara obyektif terhadap pelaksanaan kerjasma luar negeri ooleh Pemprov Aceh, maka dapat diidentifikasi bahwa Kerjasama yang dilakukan oleh pemprov Aceh dan Kota mitra dapat melakukan Kerjasama dengan optimal dan terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua daerah. Dengan adanya Kerjasama bisang pendidikan dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengeksplor negara negara yang bekerjasama dengan pemrov Aceh, tidak hanya bidang pendidikan saja, bidang ekonomi juga agar perusahaan atau pemprov kota asing dapat melakukan investasi di Aceh dengan memanfaatkan SDA dan kota wisata di Aceh.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Dapat dilihat dari kesimpulan di atas bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penelitian ini adalah data yang penulis temukan terkait Kerjasama antara Pemprov Aceh dan mitra lain nya yang terbatas. Data ini mungkin akan lebih banyak apabila ditinjau dengan melakukan wawancara dan terjun langsung ke beberapa Dinas seperti BPSDM, BAPPEDA, DAN Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Aceh. Dengan melakukan wawancara dengan beberapa Dinas Yang berkaitan dengan Judul penulis tentunya akan menambah informasi yang lebih banyak dan Bisa mengetahui apa saja bentuk bentuk Kerjasama Sister City yang sudah terjalin antara Pemprov Aceh dengan Mitra daerah lain sejak tahun 2010 - 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti, A.T. (2013) *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta
- Wolff, Stefan, 'Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges', hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham, 2009
- Mukti, Ali, 'PARADIPLMACY; kerjasama luar negeri oleh pemda di indonesia', *the phinisi press Yogyakarta, 2013*
- Novialdi, Rizky, Rasanjani Saddam, 2020 *Optimizing the Ability of Aceh Province in Paradiplomacy Practice, Department of International Relations, Al Muslim University, Bireuen – Indonesia*
- Mukti, T.A, 2018, *Paradiplomacy and the Future of Aceh Government, Faculty of Political and Sosial Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Warsito, Tulus, Surwandono, Idham, Ulung, Takdir, 2019, *Manajemen Paradiplomasi dan Politik Lokal Gerakan di Aceh, Indonesia, dan Catalonia, Spanyol*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
- Criekemans, David, 2008 "Are the Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?", University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium. Dikutip oleh Takdir Ali, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Zuboidi, Hayatullah, 2018, *kepentingan Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Drussalam*, jurnal Peurawi, media kasian komunikasi islam, Vol. 1 No. 2

- Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* (New York: Routledge, 2015).
- Sandra, Rizqi Zenita, 2015, *Praktek paradiplomacy pemma dalam eksploitasi air sungai bawah tanah di gua biring di kab. Gunung kidul 2004-2015*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Neves, Miguel Santos, 2010, *Paradiplomacy, Knowledge Regions and The Consolidation of Soft Power*, *JANUS NET e-journal of International Relations*, No.1, Autumn 2010.
- Raco, Jozef, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Burhanudin, Jajat, 2016, *Studia Islamika: Pasang Surut Hubungan Aceh dan Turki Utsmani: Perspektif Sejarah*, Vol. 23 No. 2, hlm: 377-378, Jakarta.
- Zuboidi, Hayatullah, 2018, *Jurnal Peurawi: Kepentingan Utsmani Menjalin hubungan dengan Kerajaan Aceh Darussalam*, Vol. 1 No. 2 hlm. 114.
- Cezmi, Eraslan, 1992 *Abdil hamid ve Islam birliđi [Abdulhamid and Islamic unity]*, (Istanbul: Otuken Publications,), hlm. 90.
- Anthony Reid, 1969 *The Contes fot North Sumatra; Atjeh the Netherlands and Britain 1858- 1898*, Kuala Lumpur: Oxford University Press), hlm. 138.
- Marzuki, M.Asfar, 2006, *Masyarakat dan Budaya; Penegakan Syarit Islam dalam Perspektif HAM Internasional dan Konstitusi*, Vol. 8 No. 1 hlm. 117
- Mukti, Ali T, 2018, *Paradiplomasi Dalam Pemerintahan Berdasarkan Hukum Syariah Islam Di Aceh*, universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yogyakarta.

- Mukti, Ali T, 2010, *Tinjauan Yuridis Dan Teoritid terhadap Kerjasama Internasional Daerah Otonom*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yogyakarta
- Ismi, M, 2019, *Metode Pembelajaran Tahfizh di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, Universitas Islam negeri Ar-raniry; Banda Aceh
- Junaidi, Qasimil, 2017, *Proses Komunikasi Pengajar Turki Dalam Menghadapi Gegar Budaya Dengan Masyarakat Aceh*, Universitas Syiah Kuala; Banda Aceh
- Alfarisi, Habib, 2021, *Analisis Kerjasama Pemerintah Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang*, Universitas Potensi Utama, Vol. 3, No. 1
- Fathun, Laode Muhamad, 2016, *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1 No. 1
- Aini, Thaibatul, 2015, *Peran Pacific Countries Sosial and Economic Solidarity Association (PASIAD) dalam Mempererat Hubungan Bilateral Turki-Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2014*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yogyakarta
- Karnila, Widya, 2019, *Pendidikan Islam Pada Masa Sultan Iskandar Muda*, Universitas Islam Negeri Raden Intan; Lampung
- Harun, Cut Zahri, Zulkarnaini, Khairuddin, 2015, *Perencanaan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Aceh*, universitas Syiah kuala; Banda Aceh.

- Tyana, Fitri Ariska, 2017, *Kebijakan Pendidikan Islam Di Turki Pada Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk*, Universitas Islam Negeri Raden Intan; Lampung
- Julia, Gabriella, Max, K. Sondakh, dan Fernando J. M. M. Karisoh, 2020, *Hubungan Luar Negeri Pengaturan Hukum Mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang*, Vol. 8 No. 4
- Kemlu (2017) KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA ISTANBUL TURKI. <https://kemlu.go.id/istanbul/id/read/profil-perdagangan-indonesia-wilayah-kerja-kjri-istanbul-2019/301/information-sheet>
- Novialdi, Risky, 2016, *Pengaruh Bencana Tsunami Terhadap Peningkatan Soft Power Diplomasi Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2004-2015*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yogyakarta.
- Salma, Mutia Zakia, 2015, *Analisis Peran Masyarakat Sipil Terhadap Efektivitas Dan Perkembangan Kerjasama Sister City: SSSCA (Seattle - Surabaya Sister City Association) Dalam Lima Periode Implementasi Kerjasama*, Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 1
- Kementrian Dalam Negeri, Sister City, peluang emas bagi pembangunan daerah 2014 dilihat diakses melalui <https://kemendagri.com> tanggal 05 september 2021
- Nugroho, Agus, Syamsidik, Rina Suryani dan Mirza Fahmi, 2019, *ACEH PASCA LIMA BELAS TAHUN TSUNAMI*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: Tsunami and Disaster Mitigation Research Center

- Aulia, Wafa, dan Iqbal, M. Putra, 2018, *Kerja Samaa Sister City Antaraa Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Iqbal, M. Putra, dan Lyndi, Istiq Farah, 2018, *City Partnership (Sister City) Between Banda Aceh (The Republic of Indonesia) And Samarqand (The Republic of Uzbekistan) On Trade Aand Industry in Banda Aceh*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Vol. 2 No.2
- Sofyan, Hizir, Muzailin affan, Hasan Basri, Miftahuddin, dan Ria Ervilita, 2019, *Aceh Mendulang Potensi Ekonomi dari dinamika Laut Andaman*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.